

DISKURSUS PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MASYARAKAT

DEDI GUSMAN

Dheydhe.06@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan kawasan wisata akan selalu mengalami pergulatan baik dalam tataran wacana maupun dalam tataran aksi. Sebagai sebuah realita dalam masyarakat, dalam setiap pengembangan pariwisata semua komponen ikut bermain dan mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang harus dipenuhi melalui diskursusnya masing-masing. Di dalam suatu pengembangan satu sisi ada pihak yang menginginkan perubahan akan tetapi, di sisi lain ada pihak yang masih tetap berpegang teguh pada nilai tradisi yang diwarisi oleh leluhur. Hal ini akan, menjadi diskursus dalam pengembangan pariwisata yang terus-menerus bertarung tiada hentinya antara setuju dan yang tidak setuju. Fenomena inilah yang terjadi dalam masyarakat saat sekarang ini hingga mengakibatkan suatu perubahan dan perkembangan multidimensional yang meliputi, ekonomi, politik, sosial-budaya, yang berimbas kepada diskursus pengembangan pariwisata.

Diskursus pengembangan pariwisata menghasilkan banyak makna seperti makna yang menjurus kepada pemerintah, industri pariwisata, masyarakat dan kaum ekologi, baik berupa dari segi ekonomi, sosial-budaya, maupun kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Kata kunci : diskursus, pengembangan pariwisata

ABSTRACT

Development of tourist areas will always have struggles both at the level of discourse and the level of action. As a reality in society, in any tourism development all the components come into play and have their own interests that must be met by each discourse. In a development of the one side there are those who want change but, on the other hand there are those who still cling to traditional values inherited by the ancestors. This will, to discourse

in the development of tourism constant unceasing fight between agree and disagree. This phenomenon is happening in the present moment is to effect a change and multidimensional development that includes economic, political, socio-cultural, the impact to tourism development discourse.

Discourse tourism development generate much meaning as meaning that leads to the government, the tourism industry, the community and the ecologists, either in terms of economic, social and cultural, as well as the interests of the parties involved.

Keywords: discourse, tourism development

1. Pendahuluan

Perkembangan pariwisata melaju seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan membaiknya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, mendorong berkembangnya kegiatan pariwisata ke jenis-jenis pariwisata yang lebih bervariasi atau beragam. Usia, status sosial dan tingkat ekonomi mempengaruhi seseorang untuk memilih jenis-jenis kegiatan wisata apa yang diminati atau bisa memuhi selera mereka. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari permasalahan pariwisata sering dibicarakan. Namun, sampai sekarang masih banyak terjadi permasalahan terhadap pengembangan pariwisata itu sendiri, yang tidak dibatasi oleh ruang waktu di mana objek pariwisata berada. Fenomena ini, melihatkan begitu banyaknya pergulatan yang terjadi dalam pengembangan pariwisata baik dari masyarakat (penduduk lokal) dengan pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang memberi kebijakan, pengusaha swasta yang ingin menanamkan sahamnya di daerah pengembangan pariwisata, kaum pecinta lingkungan yang ingin memperhatikan keasrian lingkungan, komponen-komponen ini ingin kepentingan mereka terpenuhi dengan baik dari segi apapun. Maunati (2004: 239) menegaskan bahwa elit-elit yang saling bertentangan untuk melakukan strategi-strategi yang mereka inginkan tetapi saling bertentangan karena adanya kepentingan-kepentingan yang berlawanan.

Dalam pengembangan pariwisata saat ini terutama bagi daerah yang masih dalam proses berkembang, terdapat berbagai diskursus yang berkembang, secara umum diskursus tersebut adalah, pertama diskursus pemerintah, kedua diskursus industri pariwisata, ketiga diskursus masyarakat, keempat diskursus bagi pengembangan ekologi. Diskursus-diskursus tersebut satu sama lain saling bertarung, untuk memenuhi keinginan yang akan dicapai dan dalam pertarungan antardiskursus tersebut satu diskursus pasti ada yang menang, diskursus yang menang adalah diskursus yang selalu didukung oleh penguasa, dan kebenaran terhadap kemenangan itu tidak selalu final atau terus menang, di saat lain diskursus menang tersebut bisa kalah dan diskursus kalah bisa menang.

Dalam hal ini, istilah diskursus bukan hanya merupakan sebatas kawasan bahasa, akan tetapi juga berkaitan langsung dengan praktik sosial dan relasi sosial di belakang praktik tersebut, karena di dalamnya ada nilai, makna dan filosofis di balik kata dan bahasa tersebut. Untuk memudahkan pemahaman dan tidak menimbulkan kesalahpengertian, diskursus dibedakan dengan wacana. Dalam linguistik, wacana secara umum adalah ujaran-ujaran verbal yang besarnya lebih luas dari kalimat. Ungkapan bahasa Indonesia "sekadar wacana" misalnya berarti sekadar pernyataan (baik kata-kata lisan maupun tulisan), yang tidak bisa disamakan dengan diskursus karena diskursus mengandung praksis sedangkan wacana tidak.

Dengan kata lain, diskursus mengandung wacana, sehingga wacana hanya sebagian kecil dari diskursus karena diskursus mencakup pernyataan, praksis, dan berbagai hal lainnya. Berhubungan dengan pembedaan diskursus tersebut, mengacu pada James Paul Gee dalam Hamad (2004: 34-35), "discourse" (d kecil) berbeda dengan "Discourse" (D besar). Pertama (*'discourse'*) menjadi perhatian para ahli bahasa

(linguis atau sosiolinguis), sedangkan yang kedua (*'Discourse'*) merangkaikan unsur linguistik tadi (*"discourse"* dengan d kecil) bersama-sama unsur non-linguistik (*non-language 'stuff'*) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Jadi, discourse (D besar) melihat pemakaian bahasa dalam sebuah sistem sosial (socio-linguistik).

Pernyataan Gee tersebut, yang dimaksud *"discourse"* (d kecil) sama dengan *"wacana"* sedangkan *"Discourse"* (D besar) sama dengan *"diskursus"* dalam artikel ini. Akibatnya adalah, wacana hanya terkait dengan gejala kebahasaan sedangkan diskursus menyangkut hubungan antara gejala bahasa dan persoalan-persoalan di luar bahasa. Di samping lebih luas dari wacana, diskursus (*discourse*) juga lebih luas dari teks (*text*), sehingga diskursus tidak harus bersifat tekstual.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan makna diskursus pengembangan pariwisata di antaranya: 1) makna diskursus pengembangan pariwisata bagi pemerintah; 2) makna diskursus pengembangan pariwisata bagi industri pariwisata; 3) makna diskursus pengembangan pariwisata bagi budaya masyarakat; 4) makna pengembangan pariwisata bagi ekologi (Lingkungan).

2. Makna Diskursus Pengembangan pariwisata bagi Pemerintah

Pengembangan pariwisata dalam pemerintah dalam konteks otonomi daerah merupakan anugrah ekonomi. Hal ini disebabkan sebagai penambah pendapatan anggaran daerah dalam bentuk pajak-pajak dan efek ganda dari kegiatan wisatawan di sekitar pusat pengembangan pariwisata, masuknya inventaris para pemodal untuk membantu dalam pengembangan pariwisata daerah. Dalam hal ini makna pengembangan pariwisata bagi pemerintah mempunyai arti sebagai perbuatan usaha, ataupun upaya bermakna,

karena berjalannya usaha tersebut dapat tercapainya suatu tujuan tertentu. Pengembangan pariwisata di suatu daerah mempunyai makna, yaitu makna berhasilnya program kerja pemerintah, sebagai ikon wilayah dan makna kegunaan secara ekonomi yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal di bidang pariwisata, dapat dipergunakan sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat, mengikat pendapatan anggaran daerah dengan masuknya wisatawan dan proses pertukaran uang asing, mendorong masyarakat untuk berwirausaha seperti: pedagang kerajinan, pemasok bahan makanan.

Makna yang diproduksi dari diskursus pengembangan pariwisata tidak tetap, bisa berubah sesuai dengan konteks dan waktunya. Jadi, makna tidak bersifat satu makna tetapi bersifat multi, seperti dalam satu kelompok membahas sebuah masalah dan memberi makna yang tentang hal yang dibahas, tetapi setelah salah satu keluar dari kelompok dan membuat kelompok baru mereka akan membuat makna baru seperti apa yang ditafsirkan oleh kelompok lain dan itu dibolehkan karena makna tidak mempunyai makna akhir atau mutlak yang tidak bisa dirubah. Jacques Derrida(dalam Barker, 2005: 105) menyatakan bahwa makna dihasilkan dari kode-kode bahasa yang dibongkar, khususnya struktur oposisi pasangan sedemikian rupa, sehingga menciptakan suatu permainan tanda yang tanpa akhir dan tanpa makna akhir atas oposisi-oposisi biner hierarkhis, seperti tuturan/tulisan, realitas/penampakan, alam/budaya. Akal dan lain-lain yang berfungsi menjamin kebenaran dengan cara menampilkan pasangan yang lebih inferior dalam masing-masing oposisi biner.

Dalam pemaknaan bagi pemerintah pengembangan pariwisata mempunyai makna yang positif sedangkan dari pandangan lain memberi makna lain. Makna perbuatan seperti berhasilnya program kerja pemerintah bagi suatu

kalangan masyarakat, makna keberhasilan program kerja pemerintah bukan sebatas yang terlihat tetapi ada makna lain yang terdapat di balik makna program pemerintah terutama sebagai perorangan. Makna ini bisa sebagai pencitraan terhadap diri yang memimpin saat ini, dan keberhasilan yang didapatkan sekarang akan membantu untuk keberhasilan selanjutnya di sini keberhasilan kerja bukanlah kenyataan tetapi hanyalah sebuah kamufase yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan pribadi.

Bagi pandangan lain ungkapan peningkatan dalam bidang wirausaha hanyalah sebagai alasan semata, karena sebelum pengembangan pariwisata, masyarakat sudah beranggapan melakukan kegiatan berwirausaha. Bagi masyarakat kenapa yang sudah ada tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik apabila untuk membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Dalam pandangan ini dapat dilihat bahwa sifat relasi yang tidak tetap, tidak stabil menyebabkan relasi *signified-signifier* itu dapat ditunda untuk memperoleh relasi yang baru. Dalam proses pemahaman makna bukan sekadar karena adanya proses oposisi atau differensiasi (*difference*), tetapi karena adanya proses penundaan antara penanda (bentuk tanda) dan petanda (makna) untuk menentukan makna lain atau makna baru (Hoed dalam Nofriyaman 2011: 65).

3 Makna Diskursus Pengembangan pariwisata bagi Industri Pariwisata

Bagi industri pariwisata, adanya pengembangan pariwisata merupakan berkah, atau peluang untuk menanamkan modal. maka wilayah pengembangan pariwisata merupakan ladang yang sangat memungkinkan untuk menanamkan modal di bidang pariwisata mengingat tingginya pengaruh pariwisata terhadap ekonomi. Pada umumnya pasar dikuasai oleh kaum ekspariat/borjuis karena

memiliki pengetahuan, pengalaman, dan modal, sehingga pembangunan dikuasai oleh kaum ekspatriat, sejalan dengan teori kekuasaan/pengetahuan atau dengan istilah *power/knowledge*. Relasi kekuasaan menjadikan pengetahuan sebagai situs bagi strategi pergulatan dan konflik demi kekuasaan.

Dilihat dalam menjalankan perannya, pemerintah dan industri pariwisata menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuarapada pemberian manfaat ekonomi bagi pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat lokal. Bagi industri pariwisata alam lingkungan yang indah, budaya yang unik, merupakan komoditas yang utama ataupun modal utama dalam mendatangkan keuntungan atau uang. Dalam pemaknaan lain yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat merepresentasikan pikiran-pikiran mereka ke arah keselamatan lingkungan (*ecocentris*), tidak hanya mempertimbangkan manusia dan sosial budaya masyarakatnya saja dan sangat baik apabila keduanya saling disenergikan. Selain itu, pembangunan ekowisata hanya sebagai kedok, sebagai upaya, sebagai jalan dalam usaha memapankan modal bagi pemodal.

4 Makna Diskursus Pengembangan pariwisata bagi Budaya Masyarakat

Budaya merupakan salah satu daya tarik wisata. Dalam menilai makna sosial budaya dalam pariwisata terhadap kehidupan masyarakat lokal merupakan pekerjaan yang tidak akan ada habisnya. Salah satu kendala yang tidak dapat diamati karena banyaknya faktor kontaminasi (*contaminating factors*) yang ikut berperan di dalam mempengaruhi perubahan yang terjadi. Sangat sulit untuk mengisolasi suatu faktor penyebab, karena masyarakat tidak dapat diperlakukan seperti specimen

yang dapat diteliti dilaboratorium.

Dalam kaitannya dengan makna pengembangan pariwisata dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, maka harus dilihat ada banyak faktor lain yang dapat mengubah makna sosial budaya, seperti pendidikan, media masa, transportasi, komunikasi, ataupun sektor-sektor pembangunan lainnya yang menjadi wahana dalam perubahan makna sosial budaya, serta dinamika internal masyarakat itu sendiri, seperti makna: pertama, dikenalnya kesenian atau budaya daerah keluar oleh wisatawan, dengan diminatnya kesenian dan kerajinan oleh para wisatawan, membuat penduduk lokal bergairah untuk mendalami seni budaya sendiri secara lebih mendalam dan menggali potensi-potensi yang ada, contoh tercipta kreasi baru dalam mengemas makanan khas; kedua, timbulnya kebanggaan dari penduduk lokal dengan mengetahui bahwa kesenian dan kebudayaannya dihormati dan dikagumi oleh orang luar; ketiga, dengan adanya pariwisata berarti adanya pertemuan dua budaya yang berbeda (*cultural exchange*) yang pada akhirnya membuat para wisatawan memahami budaya lokal, sehingga pada akhirnya tercipta pengertian dan penghormatan terhadap budaya, selain dari budaya para wisatawan itu sendiri.

Pariwisata menjadi salah satu sumber penarik bagi devisa negara. Di samping pemanfaatan pengembangan pariwisata sebagai objek. Artinya kehadiran pengembangan pariwisata dapat bermakna kesejahteraan sosial, meskipun dalam realitasnya yang memetik manfaat terbesar justru kaum pemilik modal. Dalam hal ini sebagian kalangan masyarakat beranggapan bahwa pengenalan kesenian dan budaya daerah keluar oleh masyarakat merupakan suatu penurunan nilai kesenian dan budaya daerah. Penurunan dari nilai sakral ke nilai profan yang menyebabkan masyarakat sendiri ikut menurunkan nilai kesenian dan budaya yang ada karena keterpaksaan dan ketidak sadaran yang dipengaruhi

oleh kaum borjuis atau pemerintah untuk melakukannya. Sekarang nilai kesakralan telah hilang dan berubah menjadi profan karena pengaruh keuntungan atau uang yang akan dicapai dalam artian bergesernya makna lama dan menculnya makna baru.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah perkembangan budaya dalam masyarakat asli di sekitar kawasan pariwisata yang berbeda dengan budaya para wisatawan. Disadari atau tidak, lambat laun akan terjadi pergeseran budaya yang mungkin dapat melenyapkan budaya asli. Idealnya dalam suatu kawasan pariwisata timbul suatu keterikatan dan rasa saling menghormati antarkomunitas penduduk asli dengan wisatawan. Untuk meminimalkan dampak yang timbul di kemudian hari diperlukan integritas, kualitas, loyalitas dan kemampuan pengelola dalam melaksanakan pengawasan. Proses oposisi ini menunjukkan bahwa sebuah perbedaan pasif yang sudah ada sebagai kondisi dari penundaan serta sebuah tindakan membedakan atau menunda yang menghasilkan perbedaan. Dalam gagasan-gagasan Derrida menyatakan bahwa *differance* itu berlangsung pada taraf fenomenal (tulisan biasa) dan pada taraf *transedental* (sebagai syarat bagi komunikasi lisan, maupun tulisan). Pada taraf *transedental* inilah menurut Derrida, pengertian *differance* tak dapat dilukiskan dan tak dapat dikatakan (Derrida dalam Piliang 1999: 79).

5 Makna Pengembangan pariwisata bagi Ekologi (Lingkungan)

Pengembangan pariwisata secara ekologi membantu memelihara lingkungan. Wisata ini juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap lingkungan, budaya, sejarah, partisipasi penduduk lokal dan ekonomi dengan berupaya mengendalikan motif ekonomi ke arah pelestarian sumber daya alam dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu

pengembangan pariwisata harus dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan menjaga kualitas lingkungan. Tetapi itu hanya berupa sebatas pemahanan-pemahaman tertentu yang di dalamnya juga terdapat berbagai kepentingan.

Apabila ditelusuri dengan kritis bahwa dalam pengembangan pariwisata dengan konsep konservasi tetapi untuk melakukan pengembangan pariwisata harus mengorbankan beberapa hutan, pohon-pohon yang telah lama tumbuh, permukiman masyarakat atau tergusurnya masyarakat dari tempat sendiri, hal ini dilakukan untuk membangun fasilitas pendukung pariwisata. Apabila dilihat pengembangan pariwisata tanpa disadari telah merusak ekosistem lingkungan dan mengantinya dengan yang baru.

Pengembangan pariwisata secara ekologi telah merusak ekosistem, dalam jangka waktu tertentu akan sulit untuk dikembalikan seperti aslinya, pengembangan pengembangan ini merupakan bentuk baru dari ekosistem yang ada di dalamnya. Dapat diartikan dalam suatu pengembangan yang berbasis masyarakat merupakan sebuah kamuplase untuk menutupi hal yang sebenarnya terjadi. Derrida (dalam Ratna, 2009: 230) menyatakan konsep ucapan-tulisan dapat saja di balik menjadi tulisan-ucapan, artinya dalam pembacaan realitas oleh setiap orang berbeda-beda tidak akan pernah sama. Oleh sebab itu, tidak ada makna tunggal karena makna realitas sangat tergantung kepada sudut pandang setiap penafsir yang berbeda-beda. Foucault memberi warna dimensi moral dengan cara menegaskan bahwa setiap usaha menafsir adalah usaha untuk menguasai (Grenz dalam Nofriyasman 2011:69).

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Chris. 2005. *Cultural studies. Teori dan Praktik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Masa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Granat.
- Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, Yogyakarta: LKiS.
- Nofriyasman. 2011. "Politik Representasi Istana Basa Pagaruyuang Sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat (Disertasi)". Denpasar: Program Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Piliang, Yasraf Amir. 1999. *Hiper-Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS.
- Ratna, I Nyoman Kutha. 2009. *Teori, Metode, dan Teknik Penulisan Satra dari Strukturalisme Hingga Postrukturalis Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.